

# MENCIPTAKAN AIR SOVEREIGNTY WILAYAH UDARA PULAU PAPUA

Taufik Nur Cahyanto <sup>1</sup>

**Abstrak:** Mewujudkan kedaulatan udara di wilayah udara Papua pada khususnya dan wilayah nasional Indonesia pada umumnya merupakan suatu keharusan untuk memproteksi terhadap sumber daya alam nasional untuk kepentingan bangsa sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan bangsa. Potensi disintegrasi bangsa dapat diantisipasi dengan pemerataan pembangunan dan deteksi dini terhadap adanya usaha melalui konsep *asimetric* yang memanfaatkan media udara. Upaya dalam rangka pencapaian Air Sovereignty di wilayah udara Papua dapat dilaksanakan dengan peningkatan kemampuan ISR melalui skadron udara UAV, pengembangan kekuatan udara berkemampuan *counter insurgency* (COIN) serta kemitraan Pemerintah Daerah dan TNI dalam bentuk pembelian dan pengoperasian pesawat angkut produksi dalam negeri untuk kepentingan bangsa dan negara

**Kata Kunci:** Papua, UAV, ISR, Air Sovereignty .

*“Dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga serta dalam menghadapi apapun juga, JANGAN LENGAH. Karena kelengahan menyebabkan kelemahan, kelemahan menyebabkan kekalahan dan kekalahan berarti PENDERITAAN”*

**(Panglima Besar Jendral Sudirman)**

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah panjang dan berliku perebutan Irian Barat dikenal dalam sejarah kita sebagai Operasi Trikora yang terjadi pada tahun 1963. Perebutan wilayah tersebut tidak terlepas dari kondisi alam pulau yang lebih dikenal sebagai Pulau Papua yang kaya dan berlimpah akan biji tembaga, perak bahkan emas. Tidak heran catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa negara besar berada di balik proses kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI. Mengingat tingginya tingkat daya tarik sekaligus daya pikat wilayah tersebut, sudah barang tentu wilayah tersebut akan selalu diperebutkan dalam arti luas oleh berbagai pihak. Irian Barat selanjutnya pada era orde baru dikenal dengan sebutan Irian Jaya. Kemudian perkembangannya menjadi Propinsi Papua Barat dengan ibukota Manokwari dan Propinsi Papua dengan ibukota Jaya Pura. Kedua propinsi ini sama-sama mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat.

Mengingat kondisi alam Pulau Papua yang sebagian besar di dominasi oleh pegunungan dan hutan tropis, membuat wilayah ini kaya akan sumber daya alam sekaligus susah untuk dijangkau dengan sarana transportasi darat. Beberapa wilayah terpisahkan oleh gunung dan alam yang tidak mudah untuk dicapai sehingga membuat wilayah ini mempunyai ketergantungan

yang cukup tinggi terhadap pesawat udara sebagai media transportasi. Alhasil, media udara menjadi sangat krusial untuk dijaga kedaulatannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah NKRI paling timur ini berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) sedangkan beberapa negara Asia Pasifik dan Australia terbentang di sekitarnya.

Melihat media udara di wilayah Papua sebagai jalur keluar masuk segala aspek, harus membuat kita lebih waspada dan tidak lengah akan datangnya ancaman dari dalam maupun luar negeri. Banyaknya landasan perintis di lereng-lereng bukit membuat mobilitas udara di Pulau yang dipenuhi hutan perawan tersebut susah untuk di deteksi. Dalam pembahasan kali ini, mari kita coba bersama memahami arti penting sebuah kedaulatan udara (*air sovereignty*) bagi sebuah negara, melihat kondisi kemampuan control of the air di wilayah Papua saat ini, potensi dan ancaman kedepan serta langkah untuk menciptakan *air sovereignty* guna mengantisipasi kelengahan kita yang mungkin dapat berakibat penderitaan seperti kata-kata mutiara Pangsar Sudirman beberapa puluh tahun yang lalu.

## 2 MEMAHAMI ARTI AIR SOVEREIGNTY BAGI SEBUAH NEGARA

Bagi sebuah negara, kedaulatan udara merupakan bentuk pencapaian yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan sebuah kedaulatan negara. Mantan KSAU, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim pernah menyatakan, bahwa “Kedaulatan udara akan mendukung pembangunan menuju kemakmuran masyarakat, *air security will bring prosperity*”.

<sup>1</sup> Taufik Nur Cahyanto adalah anggota Divisi Kajian Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”. Penulis dapat dihubungi melalui email dengan alamat: topepx@yahoo.co.id

Lebih jauh lagi beliau beranggapan, bahwa kedaulatan udara sama pentingnya dengan kedaulatan lautan. Kurangnya kedaulatan di laut mengakibatkan terjadinya praktik perikanan ilegal dan pencurian sumber daya alam yang nilai kerugiannya bisa sampai triliunan rupiah per tahun. "Di udara kerugiannya juga banyak. Orang akan bebas terbang di wilayah kita, mengangkut barang atau orang seenaknya,"<sup>1</sup>

Konvensi Paris tahun 1919 menyatakan bahwa ruang udara di atas daratan dan perairan territorial suatu negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan eksklusif dari kedaulatan negara yang bersangkutan. "*Air Sovereignty mision is The integrated tasks of surveillance and control, the execution of which enforces a nation's authority over its territorial airspace.*" (US Military DOD)

Oleh karenanya, dalam upaya pencapaian kedaulatan udara (*air soeverignty*) diperlukan kekuatan udara (*air power*) yang mempunyai kemampuan *control of the air*, *air strike*, *air support* dan kemampuan eksploitasi informasi.<sup>2</sup> Sedangkan derajat kemampuan pengendalian Udara (*control of the air*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Keadaan Udara Yang Menguntungkan (*Favourable Air Situation*). Keadaan ini diindikasikan dengan tingkat kekuatan udara lawan yang diperkirakan tidak cukup mampu menghadapi kekuatan udara kita, baik dioperasikan secara mandiri maupun gabungan dengan kekuatan darat dan laut.
- B. Keunggulan Udara (*Air Superiority*). Keadaan ini digambarkan dari derajat dominasi kekuatan udara kita pada suatu pertempuran udara terhadap kekuatan udara musuh, sehingga kekuatan udara musuh bukan sebagai ancaman serius di atas suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.
- C. Supremasi Udara (*Air Supremacy*). Keadaan ini ditandai dengan kondisi kekuatan udara lawan yang sama sekali bukan merupakan suatu ancaman bagi kekuatan udara kita maupun terhadap kedaulatan nasional atau terhadap operasi darat, laut, dan udara yang sedang dilaksanakan.

Dari klasifikasi kondisi diatas, tentunya kita berharap dapat mencapai kondisi Supremasi udara (*Air Supremacy*) dimana kekuatan udara di sekitar wilayah udara Papua sama sekali bukan merupakan suatu ancaman bagi kekuatan udara maupun terhadap kedaulatan nasional kita. Oleh karena itu, perlu kiranya kita identifikasi kondisi

kemampuan *control of the air* di wilayah udara Papua saat ini dalam rangka mencapai supremasi udara sebagai modal dasar pencapaian *air sovereignty*.

## 2.1 Kondisi Kemampuan Control Of The Air Di Wilayah Papua Saat Ini

Selanjutnya mari kita tengok kondisi kemampuan *control of the air* kita di wilayah udara Papua agar kita bisa menilai dimanakah posisi klasifikasi kita berada.

### 2.1.1 Kemampuan *Reconnaissance* dan *Surveillance*.

Data empiris mencatat bahwa TNI AU sebagai kekuatan inti dalam penegakan kedaulatan negara di udara telah melaksanakan tugas dengan baik, terbukti telah beberapa kali mendeteksi dan mengadakan penindakan terhadap adanya penerbangan gelap yang melintas di wilayah udara kita. Pada tahun 2012, dua pesawat tempur Sukhoi menghentikan pesawat asing yang melintas di wilayah udara Indonesia tanpa ijin. Pesawat jenis Cessna 208, N-354 RM, dengan pilot Michael E. Boyd, berkewarganegaraan AS dengan tujuan dari negara kecil di kawasan Pasifik, tepatnya di utara Papua menuju ke Singapura, telah dipaksa mendarat di lanud Balikpapan. Selanjutnya pada tahun sebelumnya, tahun 2011, Kohanudnas mencegat pesawat jet P2-ANW Dassault Falcon 900 EX yang ditumpangi wakil Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG) Belden Namah yang melintas tanpa izin. Hal tersebut telah menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa kita memang serius dalam menegakkan Kedaulatan Udara kita.

Namun demikian, tantangan ke depan adalah deteksi dan penindakan tidak hanya terhadap pesawat-pesawat pengintai siluman yang mempunyai kemampuan supersonic tapi juga ancaman asimetrik dari pesawat-pesawat komuter yang bergerak bebas di sela-sela bukit terjal dari satu landasan perintis menuju ke landasan perintis lain. Kontrol terhadap muatan, misi dan kegiatan yang mereka lakukan di puncak bukit dengan ketinggian rata-rata diatas 6000 feet membuat kegiatan *intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Operation* kekuatan

<sup>1</sup> Hakim, Chapy. 2013. Kedaulatan Udara adalah Sumber Uang. [online] terdapat di: <<http://sains.kompas.com/read/2012/12/17/21551416/Kedaulatan.Udara.adalah.Sumber.Uang>> [diakses pada 17 Desember 2013].

<sup>2</sup> N. Sunarwondo, Edy. 2011. *Vademecum Book: Operasi, Pendidikan dan Latihan*. Edisi Kelima. Jakarta: Smart Institute. hal 326

lawan (anti pemerintah) mudah dilaksanakan.

Berdasarkan pengalaman pribadi sebagai seorang penerbang yang sering beroperasi di wilayah udara Papua, saya tidak bisa memastikan bahwa di tengah hutan belantara sana terdapat sebuah tempat dimana kekuatan asing sedang menyusun sebuah sarang lebah. Bahkan ketika sahabat saya menjadi korban jatuhnya pesawat Heli kurang lebih 20 s.d 25 Nm dari Lanud Jayapura, Sentani, kita membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menemukannya karena faktor kondisi medan yang susah untuk ditembus dan diamati. Menggambarkan tingginya faktor kesulitan mendeteksi kekuatan sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana kemampuan kita terhadap deteksi kekuatan pihak lain yang sengaja disembunyikan.

Infiltrasi, indoktrinasi disintegrasi, dan culture building melalui penerjunan personel yang berkedok sebagai turis dan missionaries merupakan bentuk ancaman asimetris yang harus ditanggapi dengan serius. Bebasnya pesawat-pesawat komuter yang berkeliaran di daerah pedalaman, mengindikasikan bahwa kita masih belum maksimal dalam fungsi reconnaissance dan surveillance sehingga masih lemah dalam penindakan.

### 2.1.2 Lack of Air Power Deterrence Effect

Secara teori, konsep kehadiran kekuatan militer dalam suatu wilayah dalam arti untuk menjaga kedaulatan merupakan hal yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan pengerahan kekuatan militer dalam konteks penyelesaian masalah atau konflik. Bila kita melihat kekuatan udara kita di wilayah timur, sebagian besar di cover oleh kekuatan udara yang berada di Pulau Sulawesi. Hal ini dilaksanakan dengan menganut konsep bahwa kekuatan udara yang berada di home base tersebut mampu melaksanakan fungsi operasi dan penindakan dengan karakteristik keunggulan udara. Praktis tidak ada kekuatan udara sebagai fungsi deterrence dan penindakan di wilayah Papua yang dapat mencegah adanya potensi pemanfaatan wilayah udara untuk kegiatan yang merugikan bangsa dan negara.

Melihat kondisi tersebut, membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu yang

berkepentingan dengan peluang disintegrasi dan kolonialisme modern untuk melaksanakan asimetris warfare dengan menggunakan berbagai macam sendi kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Penggelaran kekuatan udara di wilayah tersebut selama ini kita perhatikan hanya sebagai sebuah bentuk kegiatan operasi dan latihan yang rutin dan dapat diketahui secara pasti kapan akan dilaksanakan, jenis alutsista apa yang akan digunakan serta berapa jumlah yang akan digunakan. Masih jauh panggang dari api untuk mencapai tujuan hakiki menuju *air supremacy*.

## 2.2 Potensi dan Ancaman Kedepan

Wilayah Papua dikenal sebagai wilayah yang sangat menjanjikan untuk dikuasai karena potensi-potensi yang dimilikinya. Salah satu potensi yang sangat menggiurkan adalah potensi sumber daya alam yang kaya akan sumber mineral, bijih tembaga dan emas. Potensi sumber daya mineral dan energi di Papua telah dikenal luas oleh masyarakat internasional sebelum perang dunia kedua. Pada awalnya minyak bumi merupakan komoditas yang paling menarik untuk dieksploitasi. Seorang geologist yang bernama J.J Dozy dalam ekspedisinya pada tahun 1936 Pegunungan Tengah dalam upaya pencarian minyak bumi, menemukan sebuah bukit yang kaya akan unsur tembaga. Kemudian ia mengambil sampel untuk di kirim ke Universitas Leiden di Belanda. J.J Dozy menamakan bukit tersebut Erstberg yang artinya Gunung Bijih. Pada tahun 1960 publikasi J.J Dozy tersebut dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Co dan menindaklanjutinya dengan meninjau bukit tersebut. Kemudian berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, maka pada tanggal 7 April 1967 ditandatangani Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc. Freeport mempunyai hak eksklusif untuk mengelola daerah konsensi 10 x 10 Km<sup>2</sup> atau seluas 100 km<sup>2</sup> di sekitar Ertsberg. Sejak saat itulah pertambangan modern dimulai di Provinsi Papua.<sup>3</sup> Potensi lain dari wilayah ini adalah, tingkat budaya yang memegang prinsip-prinsip adat yang sangat kuat. Dimana pemuka adat merupakan sosok yang sangat dihormati dan dikagumi bagi warganya. Sehingga sejarah panjang rakyat Papua yang telah diduduki oleh kolonialisme Belanda dan bentuk kolonialisme modern mampu menumbuhkan semangat kejuangan kesukuan yang sangat tinggi.

<sup>3</sup> Website Pemda Papua.2013.Daerah Pertambangan. [online] terdapat di: <<http://www.papua.go.id/view-detail-page-30/daerah-pertambangan.html>> [diakses pada 17 Desember 2013]

Selain dari pada itu, posisi geostrategis yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinie dan terletak diantara negara-negara Asia Pasifik serta benua Australia membuat wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Bila kita ingat sejarah Perang Dunia II, Papua dianggap sebagai wilayah konsolidasi tepat bagi pasukan Sekutu untuk menyerang Jepang di Lautan Pasifik Selatan. Layaknya strategi Leap frogging Mac Arthur dalam bergerak menuju Jepang, wilayah Papua merupakan wilayah pendekat menuju wilayah laut Cina Selatan. Terlebih lagi jika kelak Cina akan menjadi kekuatan baru yang muncul di dunia, bukan hal yang mustahil bila Bumi Cendrawasih akan dapat menjadi basis pertahanan dan strategi “lompat katak” pihak tertentu dalam mengimbangi perkembangan kekuatan baru tersebut.

Beberapa ancaman selanjutnya yang dapat terjadi dengan adanya potensi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- A. **Ancaman Disintegrasi.** Beragamnya suku yang kental dengan adat ditambah dengan sejarah panjang pendudukan kolonialisme yang dirasa tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat di daerah, membuat wilayah ini rentan terhadap hasutan dan keinginan untuk lepas dari NKRI. Sebuah teori konspirasi yang muncul adalah lepasnya Papua dari NKRI akan menguntungkan beberapa pihak yang sekarang sedang mengeruk kekayaan alam di wilayah tersebut. Hembusan gerakan separatis yang membawa isu pelanggaran HAM, otonomi khusus perlu diwaspadai sebagai bentuk baru proses “invasi modern”.
- B. **Pelanggaran Wilayah Udara.** Kelonggaran wilayah udara dapat berbuah pelanggaran wilayah suatu daerah kedaulatan. Diawali dengan masuknya pengaruh asing terhadap penduduk pribumi di pedalaman dan puncak gunung , akan berakhir dengan pergerakan masyarakat yang didasari oleh kesamaan semangat hidup. Faktor geologi dan demografi membuat media udara menjadi alternative masuknya berbagai paham dan kepentingan.
- C. **Illegal logging.** Kekayaan hutan yang begitu besar berpotensi untuk perkembangan illegal logging. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran illegal logging adalah tingginya tingkat permintaan produk

kayu yang dipasok dari pasar gelap, lemahnya daya jangkau penegak hukum, dan tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan pelaku penebang liar. Hampir seluruh faktor tersebut dipenuhi di wilayah pedalaman Papua saat ini.

- D. **Infiltrasi Modern.** Ciri khas alam dan penduduk setempat dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi warga dengan metode pendekatan agama dan budaya. Masuknya personel intelegent di wilayah puncak pegunungan melalui alat transportasi udara perintis cukup susah untuk dideteksi.

### 2.3 Berbenah untuk Menciptakan *Air Sovereignty* di Wilayah Papua

Langkah selanjutnya adalah tidak lain untuk selalu berfikir untuk mengamati perkembangan dan mengambil langkah strategis kedepan untuk mencapai kedaulatan udara di wilayah Papua. Beberapa langkah yang dapat membenahi kondisi kedaulatan udara di wilayah udara tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Ilustrasi Pengembangan Skadron UAV untuk mendukung *Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR)*

#### 2.3.1 Pembangunan Sebuah Skadron UAV Sebagai Pengembangan Kemampuan *Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR)*

“The fundamental responsibility of ISR is to provide intelligence information to decision makers at all levels of command to give them possible understanding of the adversary”.<sup>4</sup> Pihak pembuat keputusan dalam segala level strata, baik sipil maupun militer pada dasarnya membutuhkan informasi yang teraktual, terpercaya dan terkini dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan. Salah satu fungsi tersebut dapat dicapai dengan menggunakan kekuatan

<sup>4</sup> Air Force Doctrine Document 2-5.2, 21 April 1999. Intellegent, Surveillance, and Reconaissance Operation

udara yang saat ini telah berkembang dengan pesat. Apabila jaman revolusi Perancis mereka menggunakan balon udara untuk mengetahui kondisi musuh, maka beberapa negara dengan perkembangan teknologi saat ini sudah memanfaatkan pesawat udara, UAV (*Unmanned Air Vehicle*) bahkan satelit untuk mendapatkan informasi kawan maupun lawan. Begitu pentingnya informasi untuk pencapaian kepentingan kedaulatan udara harus disikapi dengan serius untuk mewujudkan kemampuan *control of the air*. Sehingga dalam rangka menunjang kemampuan *control of the air*, perlu kita meningkatkan kemampuan pengamatan dan pengintaian udara guna mengontrol kedaulatan kita di udara.

Oleh karenanya pembangunan skadron UAV merupakan salah satu alternative solusi dalam membangun kemampuan ISR di wilayah Papua yang mempunyai kemampuan real time. Tinjauan taktis, geografis dan efektifitas skadron UAV ini dapat ditempatkan di Timika. Timika memenuhi beberapa pertimbangan beberapa hal seperti kesiapan operasional pangkalan TNI AU, terletak di daerah jangkauan pegunungan Tembaga Pura dimana terdapat Freeport sebagai object vital nasional, serta area landasan pacu yang dapat dikembangkan. Dalam rangka sinergi untuk kepentingan yang lebih luas nantinya perlu dikembangkan kemitraan komponen inti, cadangan dan pendukung dalam proses pengembangannya. Sehingga akan tercipta sinergi pola pikir untuk pencapaian tujuan nasional.



Gambar 2. Peta Kepulauan Papua

### 2.3.2 Pengembangan Kekuatan Udara Berkemampuan *Counter Insurgency* (COIN) di Wilayah Indonesia Timur

Pengembangan kekuatan kearah Indonesia timur, bukan sekedar mengantisipasi ancaman dari dalam negeri. Negara-negara Pasifik dan Australia sebagai negara tetangga yang berbatasan di wilayah timur bukan sebagai ancaman negara musang namun lebih kearah kekuatan yang perlu kita galang sebagai kekuatan bersama dalam menjaga kestabilan dan keamanan wilayah demi kepentingan bersama. Terlebih kita harus sadar bahwa, di Papua ini terdapat sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pegunungan dengan kandungan bijih tembaga, perak dan emas yang saat ini sedang “dinikmati bersama oleh dunia”, serta kekayaan hutan tropis yang kaya dengan kandungan alam. Alhasil , sudah barang tentu teori ada gula ada semut tidak bisa dinafikan lagi. Dengan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme modern negara kita harus waspada dan tidak boleh lengah sedikitpun. Demokrasi, HAM merupakan senjata ampuh bagaikan dua sisi sebilah pisau. Dimana masuknya pemahaman negative dari nilai tersebut dapat dimasukkan melalui lemahnya kedaulatan udara kita di wilayah Papua.

Kehadiran sebuah kekuatan air power di wilayah tersebut, merupakan langkah kongkret yang akan berdampak terhadap deterrence effect kekuatan lawan yang dapat memanfaatkan kelengahan. Paling tidak satu kekuatan Skadron Tempur Taktis yang berkemampuan *counter Insurgency* dapat ditempatkan di wilayah tersebut. Pertimbangan pembentukan baru atau penggeseran kekuatan yang telah ada, akan menjadi domain TNI AU sebagai kekuatan udara yang mempunyai pertimbangan teknis yang lebih presisi. Salah satu Pangkalan Udara yang secara Infrastruktur memungkinkan untuk digunakan adalah Lanud Biak. Kondisi geografis dan potensi ancaman gerakan separatis dapat ditekan dengan kehadiran kekuatan deterrence pesawat tempur yang berkemampuan *counter insurgency*, patroli udara bersenjata dan foto udara.



Gambar 2. Ilustrasi Kemampuan Pesawat

### 2.3.3 Pembelian Pesawat Angkut sebagai bentuk Sinergi Pemerintah Daerah dan TNI.

Propinsi Papua Barat dan Papua sebagai daerah yang mempunyai kewenangan otonomi khusus mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan wilayah yang berbasis pada kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah sebagai buah reformasi telah membuat kebijakan pengelolaan keuangan negara yang semula sentralistik menjadi terdesentralisasi. Desentralisasi fiskal di negara kita dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan dari pusat ke daerah. Artinya bahwa pemerintah pusat akan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai wujud transparansi alokasi sumber daya nasional yang nantinya akan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sehingga hal ini menuntut daerah otonom untuk berusaha meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan ciri khas dan keutamaan sumber perekonomian daerah.

Salah satu alternatif langkah dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan adalah dengan pembelian pesawat angkut medium dalam rangka menunjang kepentingan daerah. Optimalisasi penggunaan pesawat angkut produksi PT. DI nampak mempunyai nilai tambah bagi berbagai pihak. Pesawat CN-235 merupakan pesawat angkut medium produksi dalam negeri yang telah dioperasikan oleh TNI dengan kemampuan Take off dan Landing di landasan perintis. Pesawat tersebut merupakan alternative pilihan dalam rangka pemberdayaan Industri Pertahanan dalam negeri. Beberapa keuntungan yang akan bisa di dapat adalah sebagai berikut :

- A. Pemberdayaan Industri Pertahanan Dalam Negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri berarti ikut dalam usaha menciptakan kemandirian pertahanan bangsa. Sebagai bentuk prinsip “bangsa untung rakyat untung” adalah memberdayakan industri dalam negeri guna membangun kemandirian bangsa.
- B. Mendukung distribusi kebutuhan bahan pokok ke daerah pelosok. Beberapa daerah otonom mempunyai bandara perintis yang tersebar di pelosok pegunungan. Susahnya mencapai wilayah pasar membuat harga membumbung tinggi. Ketersediaan barang pun juga sangat rendah. Biaya pengiriman cukup mahal karena satu-satunya moda transportasi yang dapat digunakan adalah pesawat udara. Dengan memiliki pesawat sendiri, Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong sekaligus mengontrol harga pasar sehingga tidak merugikan rakyat sekaligus turut dalam upaya memajukan supra struktur dan infrastruktur.
- C. Optimalisasi Dan Efektifitas Sumber Daya Manusia. Salah satu keuntungan konsep ini adalah tercapainya kerja sama multi role achievement antara TNI dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya sinergi kerja sama Pemda dan TNI, Pihak pemerintah daerah tidak akan kesusahan mencari tenaga Pilot untuk pengoperasian pesawat tersebut. Sedangkan TNI akan diuntungkan dengan pemanfaatan jam terbang untuk menunjang profesionalisme skill terbang personelya. Selain dari dari pada itu para personel yang ditunjuk dari TNI tersebut dapat sekaligus melaksanakan fungsi intelegen bagi kepentingan bangsa dan negara.
- D. Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastuktur. Pesawat udara sebagai salah satu moda transportasi yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan penunjang pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan pedalaman hutan belantara di Papua. Dengan kondisi geografis yang sedemikian rupa, akses jalan darat masih belum mampu menghubungkan semua kabupaten, membuat perbedaan harga bahan pokok dan bahan bangunan sangat berbeda jauh. Sehingga untuk mewujudkan

percepatan pembangunan infra struktur bagi berlangsungnya pemerintahan dan perkembangan perekonomian daerah yang cukup lambat berkembang perlu adanya moda transportasi angkutan udara untuk mempercepat proses tersebut.

### 3. PENUTUP

Sebagai kesimpulan akhir, bahwa perlu kiranya mewujudkan kedaulatan udara di wilayah udara Papua pada khususnya dan wilayah nasional kita pada umumnya. Sehingga proteksi terhadap sumber daya alam nasional untuk kepentingan bangsa dapat dilindungi dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan bangsa kita. Potensi disintegrasi bangsa dapat diantisipasi dengan pemerataan pembangunan dan deteksi dini terhadap adanya usaha melalui konsep asimetric yang memanfaatkan media udara. Upaya dalam rangka pencapaian Air Sovereignty di wilayah udara Papua dapat dilaksanakan dengan peningkatan kemampuan ISR melalui skadron udara UAV, pengembangan kekuatan udara berkemampuan *counter insurgency* (COIN) serta kemitraan Pemerintah Daerah dan TNI dalam bentuk pembelian dan pengoperasian pesawat angkut produksi dalam negeri untuk kepentingan bangsa dan negara.

Proteksi terhadap wilayah negara dan kedaulatan negara baik di darat, laut dan udara adalah sebuah keharusan demi tercapainya kelangsungan sebuah bangsa dan negara yang berdaulat adil dan makmur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Chapy. 2012. Kompas Cyber Media. Kedaulatan Udara adalah Sumber Uang. <http://sains.kompas.com/read/2012/12/17/21551416/Kedaulatan.Udara.adalah.Sumber.Uang>. 27 Agustus 2013.
- N. Sunarwondo, Edy. 2011. *Vademicum Book : Operasi, Pendidikan dan Latihan*. Edisi Kelima. Jakarta : Smart Institute. hal 326
- US Air Force. Air Force Doctrine Document 2-5.2 21 April 1999.1999. *Intellegent, Surveillance, and Reconaissance Operation* [pdf] terdapat di: < <http://www.fas.org/man/dod-101/usaf/docs/afdd/afdd2-5-2.pdf>> [diakses pada 27 Agustus 2013].
- Website Resmi Pemerintah Propinsi Papua.2013 Daerah Pertambangan.[online] terdapat di: <<http://www.papua.go.id/view-detail-page-30/daerah-pertambangan.html>> [diakses pada 27 Agustus 2013].